

# Konflik Menjadi Nomor Satu

HERTANTO, M.Si.

Dekan FISIP Universitas Lampung

Rivalitas laten kepemimpinan pemerintahan pada jabatan politis pascareformasi umumnya terjadi karena jabatan politis tidak bersumber dari satu partai yang sama, tapi hasil koalisi sesaat atas kepentingan kekuasaan semata; bukan berdasarkan pada visi ideologis atas dasar kepentingan fundamental masyarakat.

Jagat politik nasional dalam sebulan terakhir diwarnai wacana penjarangan calon wakil presiden (wapres) oleh Partai Demokrat sebagai an-cang-ancang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Wacana ini mengembangkan isu siapa calon wapres yang layak untuk mendampingi SBY pada Pemilu 2009. Bisa diduga sejoli pemenang Pilpres/Wapres pada Pemilu 2004 itu akan berhadapan muka sebagai sesama kandidat presiden pada Pemilu 2009.

Selain itu, jagat politik lokal Lampung digonjang-gang-jing SK PAW palsu sebagai seri terkini dari imbas konflik segitiga Gubernur-Wagub-DPRD (Gubernur pada puncak segitiga serta DPRD dan Wagub pada dua kaki segitiga). Kasus SK PAW palsu bermula dari surat permintaan Wagub (tanpa mandat Gubernur) kepada Mendagri untuk menerbitkan SK PAW.

Kedua wacana di atas bukan fenomena baru dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Tulisan ini akan mengulas dua fenomena terakhir itu yang menunjukkan adanya rivalitas laten (persaingan tersembunyi) antara presiden dan wakilnya, gubernur dan

## Persaingan Terselubung

Kecenderungan dalam pola kepemimpinan politik di Indonesia adalah rivalitas laten antara pemimpin dan wakilnya. Persaingan terselubung itu saat suksesi akan muncul sebagai seteru dalam kompetisi menjadi nomor satu, bukan lagi sebagai sekutu. Pola konflik laten ini ditunjukkan dalam perebutan kepemimpinan politik di Indonesia: Presiden versus Wapres (Gus Dur vs Mega, Mega vs Hamzah); gubernur dengan wagub, bupati dengan wakil bupati, wali kota dengan wakil wali kota.

Di Lampung, fenomena ini muncul dalam pilkada antara Zulkifli Anwar (Bupati Lampung Selatan) dan Muchtar Husin (Wakil Bupati); Andy Ahmad (Bupati Lampung Tengah) versus Syamsi Ahmad (Wakil Bupati); Mozes Herman (Wali Kota Metro) versus Lukman Hakim (Wakil Wali Kota); Bahusin (Bupati Lampung Timur) versus Satono (Sekdakab); Tamanuri (Bupati Way Kanan) versus Marsidi (Wakil Bupati).

Hampir bisa dipastikan Gubernur Sjachroedin dengan Wagub Syamsurya pun akan berhadapan pada suksesi gubernur Lampung mendatang. Tidak ada kawan abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan abadi.

Panggung politik Indonesia pascapenjajahan Jepang menunjukkan kepemimpinan dwitunggal Soekarno-Hatta

kekuasaan politik. Bahkan, benih-benih keterpecahan sudah berkembang jauh sebelum kemerdekaan yang menghinggapi pemimpin partai-partai politik waktu itu, seperti Partai Serikat Islam, PNI, dll. Akibatnya jumlah partai sangat banyak dan tidak pernah mengarah kepada pengelompokan partai.

Di Malaysia, rivalitas laten dalam kepemimpinan politik terjadi pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Mahatir Mohammad. Persaingan politik Mahatir dengan para wakilnya; Musa Hitam; Gafar Baba; dan Anwar Ibrahim, sempat muncul ke permukaan dan berujung pada perpecahan.

Hal ini berbeda dengan daya kepemimpinan Lee Kuan Yew yang mampu mengendalikan para wakilnya (Goh Chok Tong; dan dari Goh kepada B.G. Lee Hsion Long). Juga Soeharto, yang mampu meredam ambisi politik para Wapresnya (Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudharmono, Try Soetrisno, dan Habibie). Pada masa itu, rebutan monopoli kekuasaan dan persaingan ambisi elite politik terpusat di istana semata, tapi tidak menjadikan keterpecahan elite.

Di negara-negara maju yang sistem politiknya relatif stabil, jumlah partai sangat terkendali dan mengarah pada sistem dwipartai secara alami, sehingga para elite poli-

tiasa terjaga saat seorang presiden yang akan bertarung kembali pada periode jabatan kedua bisa dipastikan selalu didampingi calon wapres yang sama dan dari kader partai yang sama.

## Pendidikan Akar Konflik

Rivalitas laten yang cenderung tidak sehat antara dua pucuk pimpinan menyebabkan tidak terbangunnya tim kerja birokrasi pemerintahan yang mapan; koordinasi tidak jalan; saling curiga tinggi; intrik sangat vulgar; kebijakan politik pemerintahan menjadi tanpa visi, serta etika politik dan pemerintahan diabaikan.

Rivalitas laten kepemimpinan pemerintahan pada jabatan politis pascareformasi umumnya terjadi karena dua jabatan politis itu tidak bersumber dari satu partai yang sama, tapi hasil koalisi sesaat atas kepentingan kekuasaan semata; bukan berdasarkan visi ideologis atas dasar kepentingan fundamental masyarakat.

Sinyalemen Dr. Sudjarwo, sosiolog dan pakar pendidikan, ada benarnya pendidikan adalah akar konflik dalam masyarakat kita (*Lampost*, 15-4-2006). Sejak zaman Hindia Belanda kita selalu diberi pelajaran tentang konflik *divide et impera* (pemecah-belah) oleh pemerintah jajahan, tapi tidak pernah disodori kamus konsensus, negosiasi, musyawarah, atau mufakat. Sejarah politik kerajaan-kerajaan dan pemerintahan

sistematis itu, antara raja dan patih, raja dengan putra mahkota; pangeran satu dengan lainnya; gubernur, bupati, dan wakilnya.

Pelajaran sejarah itu sudah kita pelajari sejak sekolah dasar. Kita paham, mengerti, dan sadar tentang implikasi buruk yang terjadi dan bakal terjadi dari sebuah konflik yang tidak terselesaikan, dan akan berujung pada politik adu domba.

Namun, dalam praktek politik di Indonesia pascakemerdekaan konflik itu berlanjut dan abadi. Persatuan, kesatuan, gotong royong, dan kerja sama hanyalah, sebuah retorika dan komoditas politik belaka atau sebuah hasil pemaksaan suatu rezim. Pendidikan politik yang dialogis, mencerdaskan, membebaskan, dan memanusiakan tidak pernah ada karena selalu dikalahkan politik pendidikan untuk melayani kepentingan kekuasaan.

Sebab itu, kesulitan lebih besar terjadi setelah 50 tahun merdeka, bangsa ini belum berhasil membebaskan diri dari kehidupan masyarakat majemuk bekas jajahan menuju kesatuan politik utuh, serta belum mampu membangun konsensus nasional di atas nilai-nilai fundamental (Nasikun, 2006). Apakah beban tanggung jawab sejarah ini akan kita pasrahkan sepenuhnya kepada penguasa politik? Tidak, karena kejayaan suatu negara tidak muncul dari kekuasaan politik, tetapi karena kekuatan budaya yang dianut warganya dan oleh sumbuhan para pemikir dan